

KEBIJAKAN POLITIK ETIS: MUNCULNYA GOLONGAN ELIT MODERN DI INDONESIA

Jones Simamora¹, Rahel Exclesya Sianturi², Sarah Kholijah³
Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Published April 30, 2024

Kata Kunci:

Kebijakan Politik Etis, Elit Modern, Indonesia.

ABSTRAK

Di tengah arus modernisasi yang cepat, Indonesia menghadapi transformasi sosial-politik yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan politik etis yang diterapkan selama era kolonial telah mempengaruhi munculnya golongan elit modern di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menggali dokumen-dokumen historis dan literatur kontemporer untuk memahami dinamika yang terlibat dalam pembentukan elit politik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik etis tidak hanya memperkenalkan konsep-konsep baru dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menciptakan lapisan sosial baru yang memainkan peran penting dalam politik nasional Indonesia pasca-kemerdekaan. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial dan politik di Indonesia, serta kontribusinya terhadap pembentukan identitas nasional dan kepemimpinan politik.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia terjadi di Indonesia sekitar awal abad ke-20. Politik baru yang perkembangannya berpedoman pada peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Politik baru tersebut disebut dengan *ethische politic*, yang berarti politik haluan utama (Mulyono, 1968: 99). Menurut Ricklefs, (2007:319). pada permulaan abad ke-20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan yang dilakukan sebelumnya. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini juga memiliki tujuan baru. Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dilotarkan dalam novel Max Havelaar (1860) dan dalam dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017: 752).

Sepanjang abad kesembilan belas, surplus tanah koloni telah diserap setiap tahun sebagai upeti ke kas Belanda. Sebagai berkat pembayaran ini, Belanda dapat memodernisasikan dan membangun masyarakat borjuis yang sukses. Menjelang masa Depresi, Partai Liberal telah menjadi arus dominan dalam pembuatan kebijakan dan politik di Belanda. Periode Politik Etis sebenarnya tergantung pada penaklukan militer dalam waktu yang bersamaan dengan itu, karena hanya ketika Hindia Belanda tergabung

ke dalam satu entitas tunggal saja yang memiliki tujuan modernisasi sampai dapat dicapai. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal van Heutsz jaringan kereta api diperluas di Jawa dan Sumatera, monumen kuno seperti Candi Borobudur dipugar, dan kesempatan pendidikan diperluas selebar-lebarnya (Vickers, Adrian, 2011: 24-27).

Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Di Hindia Timur pada tahun-tahun permulaan abad kedua puluh, orang telah mulai bekerja mengembangkan semangat Politik Etis. Di abad ke-19, sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi. Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan kehidupan perekonomian dan pendidikan. Kemauan dari politik etis yang diberikan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang lemah secara adil. Untuk menumbuhkan kesadaran diri dan perasaan individualisme pada elit baru Indonesia yang berpendidikan Barat itu sebenarnya suatu pengurangan terus menerus meningkatkan martabat mereka, yang berakibat pada pengurangan kekuasaan tata pemerintahan pribumi (Van Niel, Robert, 1984: 58).

Van Deventer mendapat inspirasi untuk tulisannya didasarkan atas pandangannya terhadap politik penghisapan yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap masyarakat Hindia-Belanda (Indonesia). Ia menganggap bahwa masyarakat Hindia-Belanda sudah cukup mengalami penderitaan dalam upaya untuk memakmurkan perekonomian negara Belanda. Menurut Van Deventer, sudah saatnya pemerintah Belanda memperhatikan kemajuan rakyat jajahannya. Pemerintah Belanda harus menebus hutangnya kepada masyarakat pribumi dengan memberikan prioritas utama yaitu mensejahterakan mereka (Utomo, 1995: 13). Diawali dengan adanya kesadaran nasional yang pernah dicetuskan oleh R.A. Kartini, karena Kartini telah memasukkan mimpinya *nation bewustzijn* (kesadaran berbangsa). Oleh karena itu periode Kartini ini lebih tepat disebut “Awal Kesadaran Nasional”. Sedangkan berdirinya Budi Utomo dapat disebut “Awal Pergerakan Nasional”. Kartini masih bergerak secara individu, sedangkan Budi Utomo bergerak secara organisasi pergerakan nasional. Melalui pergerakan nasional inilah, akhirnya tercapai “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”. Proklamasi inilah yang disebut sebagai puncak-puncak pergerakan nasional (Sudiyo, 2002: 17).

Melihat latar belakang dari proses pembentukan sistem politik yang baru, yaitu Politik Etis, maka penulis ingin mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan dari Politik Etis tersebut serta dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya sistem politik tersebut.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menggali dokumen-dokumen historis dan literatur kontemporer untuk memahami dinamika yang terlibat dalam pembentukan elit politik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik etis tidak hanya memperkenalkan konsep-konsep baru dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menciptakan lapisan sosial baru yang memainkan peran penting dalam politik nasional Indonesia pasca-kemerdekaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Proses Pelaksanaan Politik Etis di Indonesia

Pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda, sudah pasti, tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik etis menuntun bangsa Indonesia ke arah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajah Belanda. Politik Etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan. Tidak ada tekad baik dan

keikhlasan hati yang tulus untuk melaksanakannya. Mereka berbuat demikian karena takut kritik dan takut kalau tetap membiarkan penderitaan penduduk pribumi terus menerus akan memicu timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus menerus. yang kolonialistik-eksploitatif (Daliman, A, 2012: 72).

Pada 17 September 1901 Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina (1890- 1948) mengumumkan mengenai suatu penyelidikan tentang taraf kesejahteraan masyarakat yang berada Jawa. Isi pidato dari Ratu Belanda yaitu “sebagai negara Kristen, Nedherland berkewajiban di Kepulauan Hindia-Belanda untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi, memberikan jalan yang tegas terhadap Kristenisasi, serta meresapi keseluruhan tingkah laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Netherland mempunyai meringankan beban bangsa Indonesia dengan adanya kebijakan politik etis pada daerah ini. Berhubungan dengan itu, kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah mengalami masa penjajahan selama bertahun-tahun. Politik Etis dimulai secara resmi setelah pidato dari Ratu Belanda dan merupakan pertanda bagi dimulainya zaman baru bagi masyarakat Indonesia (Nasution, 1983: 15).

Pada tahun 1904, Menteri Idenburg menugaskan Van Deventer dan rekan-rekannya untuk menyelidiki kemerosotan kemakmuran di Jawa. Mereka mendukung Politik Etis, yang merupakan respons terhadap kondisi penjajahan yang menyengsarakan rakyat. Setelah era politik pintu terbuka, Hindia Belanda memasuki periode kapitalisme modern, ditandai dengan perkembangan industri, perkapalan, perbankan, dan komunikasi. Laporan Van Deventer mengenai kemunduran masyarakat Jawa memiliki peran penting dan diserahkan ke pemerintah Belanda. Meskipun laporan tersebut dijadikan usulan, ia mendapat tentangan dari kaum Liberal dan Demokrat Radikal. Fokus utama adalah pada pengairan, kredit pertanian, dan emigrasi, sementara pendidikan diabaikan.

Pada akhir abad ke-19, beberapa orang Belanda mulai prihatin terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi dan melakukan upaya perbaikan. K. E. Holle membantu dalam bidang pertanian, C. Snouck Hurgronje memberikan konsep pendidikan dan pengairan, dan W.P.D. de Wolff van Westerrode mendirikan Bank Kredit untuk Simpan Pinjam dan Pertanian. Dibawah Abendanon, Politik Etis lebih mengutamakan pendidikan bergaya Eropa dan penggunaan bahasa Belanda. Sekolah-sekolah seperti OSVIA didirikan untuk melatih pejabat pribumi. Namun, penduduk pribumi hanya terlibat dalam proyek infrastruktur, terutama pengairan, yang tidak selalu berhasil.

Komoditas penting seperti minyak bumi dan karet memposisikan Indonesia di depan dalam perekonomian dunia abad ke-20. Perluasan kekuasaan Belanda di luar Jawa juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi baru yang lebih penting daripada Jawa itu sendiri.

2) Pengaruh Politik Etis Terhadap Kebangkitan Nasional

Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda dalam mendirikan Sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari para bangsawan pribumi (elit pribumi), namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Para pemuda lulusan sekolah-sekolah tinggi kehakiman, kedokteran dan teknik yang kemudian berperan dalam perjuangan para pemuda Indonesia kalangan terpelajar. Pada awalnya, perjuangan pemuda Indonesia dimulai dari Sekolah Menengah (STOVIA, OSVIA dan sekolah pertanian), namun kemudian mahasiswa dari sekolah tinggi pun ikut mengambil bagian. Lulusan sekolah-sekolah menengah maupun sekolah tinggi itu yang kemudian menjadi pioner dalam perjuangan bangsa Indonesia dan pergerakan emansipasi kemerdekaan (Leirissa, 1985: 29).

Melalui surat kabar dapat dilihat kondisi kaum pribumi pada masa kolonial Belanda, antara lain keterpurukan hidup yang dialami masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, status yang rendah bila dibandingkan dengan golongan Eropa, diskriminasi antara pribumi dan Belanda (Kartodirjo, 2014: 115-116).

Para elit pribumi di Hindia Belanda menyadari penindasan yang dialami bangsa mereka oleh pemerintah kolonial Belanda dan para petinggi yang mementingkan diri sendiri. Mereka kemudian menggagas dan mengajak rakyat pribumi untuk melawan penjajahan dengan tujuan untuk maju dan memperluas akses pendidikan. Perlawanan ini diwujudkan melalui pembentukan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indische Partij, yang kemudian diikuti oleh berbagai organisasi lainnya. Organisasi-organisasi ini merancang strategi untuk meningkatkan status sosial bangsa pribumi dan mengakhiri penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional yang dibentuk oleh para generasi muda sebelum tahun 1928, antara lain:

1) Budi Utomo (20 Mei 1908)

Budi Utomo lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di Perpustakaan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda). Istilah Budi Utomo berasal dari kata “Budi” yang berti perandai atau tabiat dan “Utama” yang berarti baik atau luhur. Budi Utomo yang dimaksud oleh pendirinya ialah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perandai atau tabiat. Nama Budi Utomo ini terinspirasi dari dialog antara Sutomo dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Sudiyo, 2002: 21).

Para pendiri organisasi Budi Utomo ini merupakan para murid STOVIA di daerah Kwitang (sekarang termasuk salah satu daerah di Jakarta) yaitu Sutomo, Gunawan, dan Gumbrek pada 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo didirikan untuk merealisasikan keinginan Dr. Wahidin Soediro Husodo yang merasa iba melihat nasib bangsanya yang tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Beliau bertekad untuk mendirikan studie fonds (dana belajar) atau yang disebut juga dengan beasiswa. Dana tersebut disediakan untuk anak-anak Jawa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya.

Program utama dari organisasi ini adalah perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi anak pribumi. Tujuan Budi Utomo menurut Panyarikan (1993: 20-21) ialah:

- a. Mengadakan studie fonds untuk menolong anak-anak Indonesia di tanah Jawa yang akan melanjutkan belajar tetapi tidak memiliki biaya.
- b. Mengusahakan supaya bumiputera di tanah Jawa mengetahui adat istiadatnya.

Namun program Budi Utomo pada saat itu masih terbatas di Jawa dan Madura saja. Kemudian berkembang meliputi Bali dan Lombok. Dalam Utomo (1995: 51), tujuan perkumpulan semula adalah mencapai kemakmuran yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Budi Utomo adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan Dr. Wahidin.
- 2) Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan.
- 3) Memajukan teknik dan industri, dan
- 4) Menghidupkan kembali kebudayaan.

Alasan Budi Utomo juga memusatkan program kemasyarakatan dan kebudayaan karena pada masa itu program edukasi dari Politik Etis Belanda hakikatnya adalah imperialisme kebudayaan secara halus (Kansil & Julianto, 1985: 23). Maka program Budi

Utomo memberikan protes keras bagi penjajahan budaya yang terselubung didalam program edukasi tersebut. Program tersebut bertujuan agar bumiputera mengetahui adat istiadatnya sendiri dan tidak terpengaruh pada kebudayaan Eropa.

2) Sarekat Islam (10 September 1912)

Pada tahun 1905 didirikan sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islami di Jakarta, kemudian pada tahun 1911 Sarekat Dagang Islam di Bogor. Tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam antara lain untuk menentang kecurangan pedagang Tionghoa yang menjual bahan dagangan dengan prinsip “menjual barang busuk dengan harga murah”. Setelah itu Tirta Adi Suryo berkeliling Jawa hingga sampai di Solo. Di Solo beliau membuka cabang di Solo dengan semboyan “kebebasan ekonomi”, rakyat tujuannya, Islam jiwanya. Hal itu adalah untuk kekuatan persatuan dan kesatuan. Perkumpulan yang didirikan di Solo tersebut diketuai oleh H. Samanhudi (Hatta, 1997: 9).

Nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Pertumbuhan organisasi ini muncul akibat penjajahan Barat yang sangat panjang, sehingga menimbulkan semangat persatuan dan juga disebabkan oleh kesadaran Asia umumnya. Selain itu beberapa sebab khususnya antara lain: (a) perdagangan bangsa Tionghoa menjadi sebuah halangan bagi perdagangan Indonesia, (b) kemajuan gerak langkah penyebaran agama Kristen dan juga ucapan-ucapan yang menghina dalam parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan agama bangsa Indonesia, dan (c) cara adat lama yang terus digunakan di daerah kerajaankerajaan Jawa semakin lama dirasa tidak sesuai (Pringgodigdo (1977: 4).

3) Indische Partij (25 Desember 1912)

Indische Partij merupakan organisasi politi pertama di Indonesia yang merupakan pendukung gagasan nasionalisme politik. Penggagas berdirinya Indische Partij adalah E.F.E. Douwes Dekker (Danurdirdjo Setiabudi). Beliau merupakan seorang Indo yang melihat praktik perbedaan ras dan suku bangsa antara bangsa Barat (Belanda dan Eropa) dengan keturunan Indo.

Tujuan pembentukan Indische Partij yaitu nasib kaum Indo yang pada masa itu dianggap sebagai golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Indische Partij memiliki tujuan “Indie Merdeka” dasarnya adalah Nasionalis Indische, selanjutnya dengan semboyan “Indier untuk Indes” organisasi baru ini berusaha membangun rasa cinta tanah air dari semua “Indiere” dan berusaha mewujudkan kerja sama yang erat untuk kemajuan tanah air dan menyiapkan kemerdekaan. Berdasarkan asas dan tujuan Indische Partij memperjuangkan persatuan nasional. Indische Partij mengemukakan bahwa yang menjadi ikatan adalah perasaan nasional (Irwanto, Dedi, 2007: 33).

Douwes Dekker menyadari bahwa kaum Indo sangatlah sedikit jumlahnya, maka bila beliau tidak melakukan kerjasama, tidak akan mendapat kemenangan. Melalui karangankarangannya dalam majalah de Express, Dekker melakukan propaganda yang berisi: (1) pelaksanaan suatu program “Hindia” buat setiap gerakan politik yang sehat dengan tujuan penghapusan perhubungan kolonial, dan (2) menyadarkan golongan Indo dan penduduk bumiputera bahwa perjuangan yang telah dilakukan bangsa Indonesia akan sia-sia karena suatu ancaman yang sama, yaitu bahaya eksploitasi kolonial. Selanjutnya ia menyarankan agar mendirikan sebuah organisasi mampu mengayomi dan mengapresiasi berbagai lapisan masyarakat dan lepas dari batasbatasan yang sempit.

Atas dasar gagasan-gagasan Douwes Dekker, maka dibentuklah sebuah organisasi pergerakan bernama Indische Partij oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Suwardi Suryoningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Semboyan dari organisasi ini adalah “Indie untuk Indier”. Organisasi ini berusaha membangun nasionalisme pada bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kerja sama yang baik untuk memperjuangkan hak dan

menyiapkan kemerdekaan (Pringgogigdo, 1977: 12).

4. KESIMPULAN

Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Berbekal pengetahuan dasar dari isi novel Max Havelaar, sebagian besar pegawai kolonial ini membawa pemikiran etis ke Hindia Belanda. Politik etis membawa sedikit perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dimana ada tiga kebijakan baru yang diterapkan, yaitu pendidikan (education), irigasi (pengairan) dan emigrasi (perpindahan penduduk). Bangsa Belanda di negeri Belanda memprotes kebijakan sebelumnya yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya politik etis ini masyarakat diharapkan memiliki hidup yang lebih baik dan makmur.

Politik etis ini ternyata hanya menguntungkan pemerintah Belanda, dimana kebijakan politik etis ini hanya memberikan banyak manfaat bagi bangsa Kolonial Belanda dan bangsa asing lain di Indonesia. Kebijakan politik etis seperti pengairan atau irigasi hanyalah untuk kepentingan perkebunan bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya, seperti program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau yang kurang jumlah penduduknya, ternyata hanya untuk perkebunan bangsa Belanda, begitu juga bidang Edukasi atau pendidikan hanya untuk anak-anak keturunan bangsa Belanda, bangsa Eropa dan anak para bangsawan lokal yang mampu menempuh dunia pendidikan. Namun hanya menguntungkan bangsa Belanda dan bangsa asing, ternyata pendidikan banyak melahirkan tokoh cendikian lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh Cendikian atau pendidikan bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Daliman, A. (2012). Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX. Yogyakarta: Ombak.
- Galih, Dhimas Rangga & Artono, (2017). Penerapan Politik Etis di Surabaya Tahun 1911-1930. Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 6, Nomor 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unnesa. Surabaya.
- Hatta, M. (1997). Permulaan Pergerakan Nasional. Jakarta: Idayu Press.
- Irwanto, Dedi, (2007). Sejarah Indonesia IV. Palembang: FKIP UNSRI.
- Kartodirjo, S. (2014). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Yogyakarta: Ombak.
- Leirissa, R.Z. (1985). Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Mulyono, S. (1968). Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, (1983). Sejarah Pendidikan Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.
- Niel, R.V. (1984). Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Pringgogigdo, A.K. (1977). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C. (2007). Sejarah Indonesia Modern (1200-2004). Jakarta: Serambi Alam Semesta.
- Sudiyo, (2002). Pergerakan Nasional Mencapai & Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 403.
- Utomo, C.B. (1995). Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Vickers, Adrian. (2011). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Insan Madani..